



INSPEKTORAT
MENJADI APIP YANG EFEKTIF
DALAM
PENINGKATAN KUALITAS
KINERJA PEMERINTAH DIY

PAPARAN INSPEKTUR DIY
FORUM SKPD TAHUN 2018

PERAN APIP SEBAGAI AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH

Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah

(Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Khusus)

Quality Assurance Terhadap Tata Kelola Pemerintahan

(Penanganan Aduan Masyarakat, Reviu Kinerja, Reviu LK, Asistensi)

Mengawal Program Strategis Pemerintah Daerah

(Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Khusus, Supervisi, Pendampingan)

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

(Grativikasi, Wistle Blower, Benturan Kepentingan, Saberpungli)

PARADIGMA BARU INSPEKTORAT

Perluasan peran dari sekedar mengawasi ketaatan (*watchdog*) tetapi juga sebagai konsultan – fungsi *assurance* dan *consulting*

Perluasan jenis kegiatan *Assurance* tidak hanya audit ketaatan tetapi juga mencakup audit kinerja, audit investigasi, reviu, evaluasi, pemantauan dan sebagai *compliance office risk management*.

Pengembangan peran *Consulting* meliputi asistensi penyusunan LKPD, pendampingan audit BPK, pembimbingan dan konsultasi manajemen risiko, pengendalian intern dan konsultasi pengadaan barang dan jasa

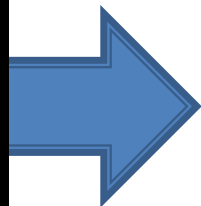
Penerapan *risk based audit planning* termasuk memperhatikan kebutuhan manajemen dalam pengendalian risiko SKPD

(1) Memiliki

Kapabilitas APIP Memadai



APIP YANG EFEKTIF



Memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan Instansi Pemerintah



Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko Instansi Pemerintah



Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola Instansi Pemerintah

(2) Mampu Mengedepankan
Fungsi Pengendalian

1.

KAPABILITAS APIP INSPEKTORAT

474 APIP Kementerian, Lembaga, dan Pemda per 31 Desember 2015, sebanyak 404 APIP atau 85,23% berada pada **Level-1**, 69 APIP atau 14,56% **Level-2**, dan baru 1 APIP atau 0,21% yang berada pada **Level-3**. Sesuai target RPJMN 2015-2019 diharapkan seluruh APIP telah berada pada Level-3 pada tahun 2019

LEVEL-1 (INITIAL) :

APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan belum dapat mencegah korupsi

LEVEL-2 (INFRASTRUCTURE) : TELAH BERHASIL DICAPAI PER JUNI 2016

APIP mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi

LEVEL-3 (INTEGRATED) : TARGET INSPEKTORAT DIY TAHUN 2018

APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern

LEVEL-4 (MANAGED) :

APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern

LEVEL-5 (OPTIMIZING) :

APIP menjadi agen perubahan



2.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)

mencerminkan tingkat peluang pencapaian tujuan

Kinerja SPI yang rendah

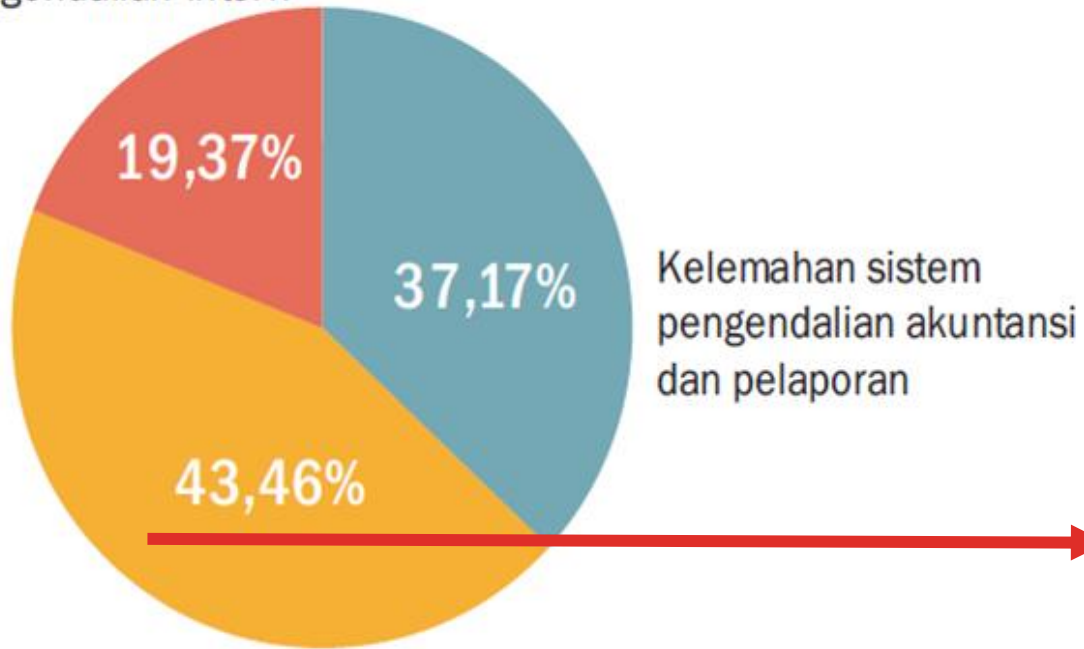
Mencerminkan kemungkinan hasil yang **rendah** dalam mencapai tujuan

Kinerja SPI yang tinggi

Mencerminkan kemungkinan hasil yang **tinggi** dalam mencapai tujuan

TEMUAN Sistem Pengendalian Intern (SPI) ATAS PEMERIKSAAN LKPD

Kelemahan struktur
pengendalian intern



Kelemahan sistem
pengendalian akuntansi
dan pelaporan

Kelemahan sistem pengendalian
pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja

Temuan
kelemahan
pd sistem
pengendalian
pelaksanaan
anggaran,
pendapatan
dan belanja,
menjadi
indikator
kelemahan
pengelolaan
keuangan
yang harus
diperbaiki

Data temuan SPI oleh APIP Inspektorat DIY
Thn. 2016 :

1. **Kasus yg merugikan Negara (120 Temuan, senilai Rp757.641.318)**
2. Pelanggaran terhadap per UU an yg berlaku (82)
3. Pelanggaran terhadap prosedur tata kerja (11)
4. Penyimpangan dari ketentuan pelaksanaan anggaran (33)
5. Kelemahan administrasi (tata usaha & akuntansi) (36)

PERAN INSPEKTORAT KEDEPAN

1. Harus mampu menciptakan PENGUATAN terhadap SPI SKPD
2. Harus mampu meningkatkan Kapabilitas APIP sampai ke level optimal
3. Harus mampu mengawal dan mempertahankan perolehan opini WTP
4. Harus mampu menciptakan perbaikan dan perubahan birokrasi
5. Harus mampu memberikan *Second Opinion* terhadap permasalahan yang menjadi *current issues*
6. Harus mampu menjadi Quality Assurance bagi SKPD
7. *Memperhatikan aduan masy. sbg referensi perbaikan birokrasi*
8. *Harus mampu menjadi katalisator dalam pencapaian Clean Government & Good Governance*

**SEKIAN &
TERIMA KASIH**

